



# RISALAH KEBIJAKAN

02/2021 Agustus,2021

# Penguatan Akuntabilitas Mutual di Sektor Wash



## Ringkasan

Pada bulan September-Desember 2020, CRPG didukung oleh Jejaring AMPL dan GWP South East Asia melakukan riset mengenai akuntabilitas mutual pada sektor WASH (*water, sanitation, and hygiene*) di Indonesia. Riset tersebut merupakan bagian dari studi Sanitation and Water for All (SWA) – kemitraan global yang bergerak dalam pemenuhan target WASH – yang dilakukan di 6 (enam) negara, termasuk Indonesia. Riset tersebut akan digunakan oleh SWA untuk meningkatkan Mekanisme Akuntabilitas Mutual (MAM) SWA agar tujuan strategis SWA dapat tercapai. Beberapa aspek yang dikaji dalam riset tersebut adalah kolaborasi para pemangku kepentingan (*multi-*

\_

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Tiga tujuan dari kerangka strategis SWA: i) To build and sustain the political will to eliminate inequalities in water, sanitation and hygiene; (ii) To champion multi-stakeholder approaches towards achieving universal access to services; (iii) To rally stakeholders to strengthen system performance and attract new investments.





stakeholders' collaboration), praktik akuntabilitas, dan implementasi MAM pada level nasional, serta dampak COVID-19 pada koordinasi dan akuntabilitas tersebut. Berdasarkan hasil riset, diperlukan penguatan dalam kolaborasi pemangku kepentingan dan pengembangan mekanisme MAM di Indonesia.

#### **Konsep Akuntabilitas Mutual**

Pembangunan Berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals* (SDGs) mengamanatkan agar pemerintah berkolaborasi dengan para aktor melalui proses *multi-stakeholder* yang partisipatif. Selain itu, akuntabilitas menjadi bagian yang sangat penting dalam pemenuhan komitmen agar tujuan SDGs, terutama dalam hal ini sektor WASH dapat tercapai.

Akuntabilitas mutual merupakan salah satu jenis akuntabilitas, seperti halnya akuntabilitas hukum dan akuntabilitas sosial (masyarakat dapat meminta pertanggungjawaban kepada pemberi layanan).<sup>2</sup> Akuntabilitas mutual menjadi semakin menarik untuk dikaji, mengingat kewenangan dalam sektor WASH terbagi di beberapa kementerian serta pelaku WASH non-pemerintah terdiri dari berbagai macam aktor.

Akuntabilitas mutual merupakan proses dimana para pemangku kepentingan dapat dimintai pertanggungjawaban oleh satu sama lain atas komitmen yang telah dibuat.<sup>3</sup> Dalam akuntabilitas mutual terdapat tujuan bersama yang hendak dicapai dan dilakukan dengan membangun kepercayaan, kesepahaman, serta kolaborasi antara para pemangku kepentingan.

Terdapat 5 (lima) elemen akuntabilitas mutual yang efektif, yaitu: 1) adanya tugas, komitmen, dan tanggung jawab yang jelas; 2) adanya penyampaian informasi mengenai kinerja/capaian; 3) kinerja dapat didiskusikan, dievaluasi, dan diperdebatkan dalam forum; 4) adanya konsekuensi atas kinerja (berdampak pada reputasi dan relasi); serta 5) adanya perubahan perilaku dan tindakan korektif.<sup>4</sup>

Dalam konteks SWA, akuntabilitas mutual merupakan proses dimana para mitra (i) secara bersama membangun sistem akuntabilitas yang kuat, transparan, dan responsif; dan (ii) dapat dimintai pertanggungjawaban oleh satu sama lain atas komitmen yang dibuat.<sup>5</sup>

Komitmen SWA terhadap akuntabilitas mutual lebih jauh tercermin dalam MAM. MAM merupakan mekanisme bagi pemerintah dan para pemangku kepentingan lainnya untuk bersama-sama membuat komitmen dalam mencapai target SDG 6. Pemerintah dan para pemangku kepentingan berkolaborasi dalam menentukan komitmen MAM nasional. Selanjutnya, perkembangan atas komitmen akan dinilai dan didiskusikan secara berkala melalui proses *multi-stakeholder* yang dipimpin oleh pemerintah atau pihak

<sup>2</sup> UNICEF, 2018, "UNICEF Engagement in Social Accountability: A Stocktake", Hal 6, dapat diakses di https://www.unicef.org/sites/default/files/2019-12/Social\_Accountability\_stocktake.pdf

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Droop *et.al*, 2008, "Paris Declaration on Aid Effectiveness: Study Of Existing Mechanisms To Promote Mutual Accountability (Ma) Between Donors And Partner Countries At The International Level: Final Report", Hal 4, dapat diakses di https://www.oecd.org/dac/effectiveness/43163465.pdf

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Willetts, et.al, 2021, "Strengthening mutual accountability in partnerships for WASH", Hal 4, dapat diakses di https://www.sanitationandwaterforall.org/sites/default/files/2021-

 $<sup>06/</sup>SWA\%20 Strengthening\%20 Mutual\%20 Accountability\%20 in\%20 Partnerships\%20 for\%20 WASH\_Part\%201\_April\%202021.pdf \ ^5 \textit{Ibid}, Hal 3.$ 





lain. Proses perencanaan dan *review* harus didokumentasikan secara jelas dan dapat diakses oleh seluruh pemangku kepentingan sektor. Selain itu, ketika komitmen tidak terpenuhi, harus ada ruang untuk dapat mengidentifikasi tindakan perbaikan dan penyesuaian yang diperlukan.<sup>6</sup>

Indonesia bergabung dengan SWA pada tahun 2017 dan sejauh ini pemerintah Indonesia telah membuat 3 (tiga) komitmen dengan target capaian tahun 2024, yaitu: (i) *strengthening peer to peer learning as part of advocacy and capacity building agenda; (ii) accelerating the achievement of National Open Defecation Free (ODF) and adoption of safely managed sanitation; (iii) Provide sustainable and innovative financing sources to sustain WASH services and ensure access of sustainable and safely managed WASH services for the poor and strengthen partnership with different stakeholders, including private sector for service delivery and resource mobilization.<sup>7</sup> Adapun, ketika riset dilakukan, belum pernah dilakukan evaluasi secara formal terhadap komitmen-komitmen tersebut oleh SWA.* 

## Metodologi

Riset dilakukan melalui (i) identifikasi dan review dokumen-dokumen terkait yang tersedia secara online, (ii) survei online (16 responden), (iii) wawancara (7 organisasi dari berbagai grup pemangku kepentingan); (iv) workshop validasi; dan (v) Social Network Analysis.

#### **Temuan**

Pada tingkat nasional, terdapat beberapa platform *multi-stakeholder* WASH yang aktif, yaitu Pokja AMPL/PKP/PPAS, Jejaring AMPL, dan SPG (Sanitation Partners Group). Pada dasarnya platform-platform tersebut mempunyai karakteristik dan keanggotaan yang pada berbeda: (i) Pokja AMPL/PKP/PPAS mempunyai keanggotaan yang secara resmi terbatas pada Lembaga pemerintah/kementerian; (ii) Jejaring AMPL mempunyai keanggotaan yang lebih luas dari pada Pokja AMPL yaitu mencakup NGO serta Institusi Penelitian; dan (iii) SPG pada dasarnya merupakan forum untuk donor di sektor WASH. Platform-platform tersebut merupakan wadah untuk berkoordinasi dan berkomunikasi antara para pemangku kepentingan WASH. Namun sejauh ini forum-forum tersebut belum memfasilitasi adanya proses akuntabilitas mutual seperti memberikan penjelasan (*answerability*) atas capaian/kegagalan, serta memfasilitasi adanya debat dan evaluasi terbuka terhadap capaian/kegagalan tersebut. Selain itu, belum ada mekanisme tindak lanjut serta konsekuensi atas suatu komitmen (dalam hal ini yang berpengaruh pada reputasi dan relasi) terhadap pemangku kepentingan yang tidak dapat memenuhi komitmennya.

Penelitian kami menemukan bahwa terdapat beberapa mekanisme akuntabilitas publik, akuntabilitas horizontal, serta akuntabilitas vertikal di internal masing-masing organisasi/Lembaga. Contohnya adalah RPJMN, laporan kinerja yang tersedia untuk publik, laporan kepada atasan di institusi terkait dan mekanisme pengaduan ke Ombudsman. Namun pada tingkat nasional, belum ditemukan akuntabilitas mutual sesuai dengan 5 (lima) elemen sebagaimana dijelaskan di bagian sebelumnya.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> *Ibid*, Hal. 12.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Indonesia's commitments are available at SWA's website https://www.sanitationandwaterforall.org/about/our-work/mutual-accountability-mechanism





Lebih lanjut, berdasarkan *Social Network Analysis* (SNA), terdapat "high fragmentation" dan "low cohesion" antara para pemangku kepentingan di sektor WASH. Lembaga donor tampak lebih sering berinteraksi dengan pemerintah dibandingkan dengan NGO atau lembaga penelitian.

Terkait SWA, sebagian besar responden menyatakan bahwa mereka mengetahui keberadaan SWA, namun tidak terlalu familiar dengan aktivitas SWA di Indonesia. Konsep MAM juga relatif baru, sehingga tidak banyak responden yang paham tentang MAM. Responden yang familiar dengan SWA cenderung berasal dari organisasi mitra SWA baik secara nasional maupun global. Sejauh ini keterlibatan aktor WASH nasional dalam SWA juga masih terbatas. Beberapa mitra aktif SWA di Indonesia yaitu Bappenas (sebagai *focal point*), UNICEF, water.org, UCLG, dan CRPG. Dengan demikian, perlu dorongan agar organisasi lain dapat aktif dalam SWA.

Lebih lanjut, COVID-19 berdampak pada pelaksanaan operasional WASH di lapangan namun tidak mengubah mekanisme akuntabilitas yang ada — mekanisme tetap berjalan sebagaimana sebelumnya. Keterbatasan pertemuan tatap muka selama era pandemi ini justru membuka peluang untuk berkomunikasi secara online atau virtual yang dirasa lebih efisien dan efektif. Menggunakan platform komunikasi online berpotensi untuk membuka partisipasi aktor WASH yang selama ini tidak dapat turut serta dalam diskusi tatap muka.

#### Rekomendasi

- Pemerintah dan mitra pembangunan membuka dan meningkatkan keterlibatan aktor WASH lainnya dalam platform MAM, terutama CSO yang selama ini belum terwakili dalam proses pengambilan kebijakan
- ❖ Pemerintah dan mitra pembangunan lainnya secara aktif melibatkan aktor WASH nasional dalam kegiatan-kegiatan SWA.
- Perlunya political will dari pemerintah, terutama Presiden untuk memprioritaskan isu-isu WASH, dengan demikian penerapan MAM dan keterlibatan Indonesia dalam SWA menjadi efektif.
- Mendesain MAM berdasarkan 5 (lima) elemen akuntabilitas mutual yang efektif, yaitu: 1) adanya tugas, komitmen, dan tanggung jawab yang jelas; 2) adanya penyampaian informasi mengenai kinerja/capaian; 3) kinerja dapat didiskusikan, dievaluasi, dan diperdebatkan; 4) konsekuensi atas kinerja (berdampak pada reputasi dan relasi); dan 5) perubahan perilaku dan tindakan korektif. Desain MAM disesuaikan dengan konteks di Indonesia. MAM harus didesain untuk memberikan kesempatan untuk saling belajar. Selain itu, MAM didesain untuk dapat melengkapi dan mendukung mekanisme akuntabilitas lainnya.
- Sekretariat SWA di tingkat internasional hendaknya melakukan pendekatan personal kepada Presiden dan Kementerian Keuangan untuk dapat meningkatkan perhatian pemerintah Indonesia terhadap WASH

Laporan lengkap riset SWA-MAM dapat diunduh disini:

https://cloud.crpg.info/docs/swamamindonesia.pdf

**Kontak** 

CRPG: Mohamad Mova Al'Afghani; <a href="mova@alafghani.info">mova@alafghani.info</a>
Jejaring AMPL: Reza Hendrawan: <a href="mova@alafghani.com">reza.hendrawan@gmail.com</a>